

Analisis *Flypaper Effect*: Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Belanja Daerah Sumatera Selatan

Anisa Cahya Ramadhani¹, Periansya², Choiruddin³

¹Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang, cahyaanisa057@gmail.com

²Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang, periansya@polsri.ac.id

³Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang, choiruddin@polsri.ac.id

ABSTRACT

Examining the impact of Regional Original Revenue (PAD) and General Allocation Funds (DAU) on regional expenditure posture, as well as analyzing the existence of the Flypaper Effect phenomenon within regency and city governments in South Sumatra Province, is the primary focus of this study. A quantitative approach was deployed, utilizing secondary data sourced from the official website of the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI). All 17 regencies and cities in South Sumatra were selected as the population, yielding a total of 85 observation units through a total sampling technique. Parameter estimation and hypothesis testing were processed using the panel data regression method via EViews 13 software. The empirical findings confirm that both PAD and DAU partially contribute significantly to the regional expenditure posture. Simultaneously, both funding sources are also proven to have a significant positive contribution. Furthermore, through a comparison of the regression coefficients, this study successfully demonstrates that the Flypaper Effect phenomenon is visibly confirmed within the financial management of regency and city governments across South Sumatra.

Keywords: General Allocation Fund, Local Own-Source Revenue, Local Government Expenditures, Flypaper Effect.

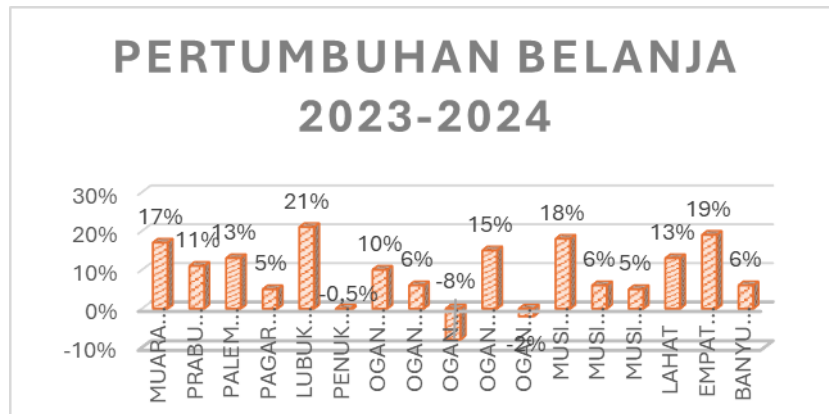
ABSTRAK

Menguji dampak Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Dana Alokasi Umum (DAU) dalam memengaruhi postur Belanja Daerah, serta menganalisis keberadaan fenomena *Flypaper Effect* pada lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan adalah topik utama yang dibahas dalam kajian ini. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam studi ini dan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari laman yang terstandarisasi BPK RI (www.bpk.go.id). Seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang berjumlah 17 wilayah dijadikan sebagai populasi, dengan total 85 unit observasi melalui teknik sampling jenuh. Estimasi parameter dan pengujian hipotesis diolah menggunakan metode regresi data panel dari aplikasi EViews 13. Temuan empiris mengonfirmasi bahwa baik PAD maupun DAU secara parsial memberikan kontribusi secara signifikan terhadap postur Belanja Daerah. Melalui simultan, kedua sumber pendanaan juga terbukti berkontribusi positif signifikan. Lebih lanjut, melalui komparasi nilai koefisien regresi, kajian ini berhasil membuktikan gejala *Flypaper Effect* terkonfirmasi nyata pada tata kelola finansial Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.

Kata kunci: : Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, Flypaper Effect.

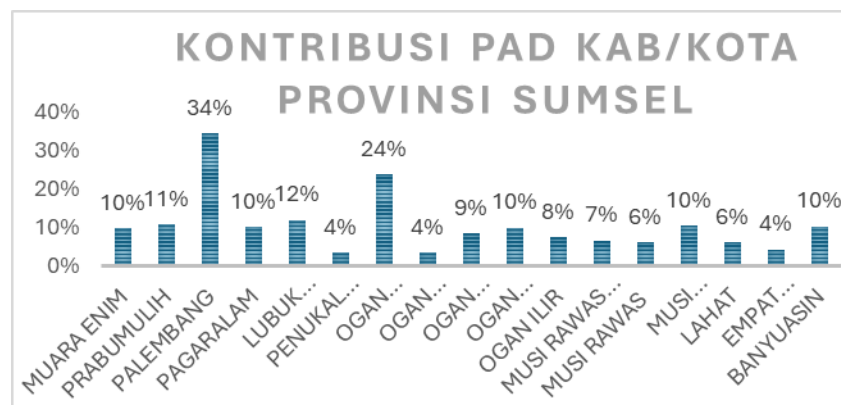
A. PENDAHULUAN

Implementasi otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 dan tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat pada Undang-Undang Daerah No. 1 Tahun 2022, secara filosofis bertujuan meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui penguatan basis pemungutan pajak lokal (*local taxing power*). Namun realitasnya, kualitas belanja daerah di Indonesia masih tergolong rendah karena didominasi pos operasional non-produktif (Zulafah dkk., 2023).



Gambar Pertumbuhan Belanja

Fenomena ini terlihat jelas di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan periode 2023–2024, di mana pertumbuhan belanja daerah berfluktuasi hingga mencapai kesenjangan 21% di OKU Timur dan -2% di Musi Rawas. Pertumbuhan ekspansi belanja yang tidak diimbangi oleh penguatan sektor pendapatan berisiko mengganggu kesehatan fiskal daerah (Mahmudi, 2019).



Gambar Kontribusi PAD

Rendahnya derajat desentralisasi fiskal di Sumatera Selatan tecermin dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 yang mayoritas masih di bawah 10%, bahkan Kabupaten PALI, OKU Selatan, dan Empat Lawang hanya mencatat 4%. Sebaliknya, postur anggaran didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) dengan angka rerata mencapai 97% untuk kontribusi ekstrem Ketergantungan yang tinggi pada dana Transfer ke Daerah (TKD) yang bersifat tidak mereduksi (*unconditional grant*) ini memicu anomali perilaku fiskal yang dikenal sebagai fenomena *flypaper effect*, di mana respon belanja daerah jauh lebih responsif terhadap kucuran dana pusat dibanding pengoptimalan PAD (Oates, 1972; Mutiara & Astuti, 2020). DAU digunakan dalam penelitian ini dikarenakan sifatnya yang lebih fleksibel dan bebas dibandingkan dana transfer lainnya seperti DAK dan DBH.

Urgensi mendeteksi *flypaper effect* di Sumatera Selatan semakin krusial menyusul kebijakan fiskal APBN 2026, di mana alokasi Transfer ke Daerah (TKD) wilayah ini dipangkas drastis dari Rp33,63 triliun menjadi Rp24,31 triliun. Penurunan ini mengonfirmasi kerentanan fiskal daerah yang selama ini "manja" terhadap dana transfer pusat. Berangkat dari kesenjangan fiskal tersebut, Sebanyak 17 entitas pemda maupun kota yang tersebar di wilayah Sumatera Selatan dipilih sebagai

Lokasi utama pengamatan dalam analisis ini. Berpijak pada latar belakang tersebut, studi ini diorientasikan untuk memetakan kekuatan hubungan PAD sekaligus DAU dalam mengintervensi postur Belanja Daerah. Di samping itu, analisis ini juga dirancang sebagai pembuktian empiris atas eksistensi gejala *flypaper effect* pada lingkup Pemda Kabupaten dan Kota di wilayah Sumatera Selatan.

B. KAJIAN TEORI

Teori Keagenan

Sudut pandang *agency theory* yang diinisiasi oleh Jensen dan Meckling (1976) memandang hubungan keagenan sebagai sebuah kesepakatan kontraktual. Melalui kontrak ini, otoritas untuk mengeksekusi keputusan didelegasikan oleh prinsipal kepada agen guna menjalankan fungsi pelayanan. Jika ditarik ke dalam ranah organisasi sektor publik, kerangka berpikir tersebut menjadi basis hubungan desentralisasi: publik memegang posisi sebagai pemilik kedaulatan (prinsipal), sedangkan otoritas lokal bertindak selaku agen yang memegang mandat pengelolaan sumber daya daerah (Halim & Abdullah, 2006). Berbeda dengan sektor privat yang berfokus pada hubungan pemegang saham dan manajemen, hubungan keagenan di sektor publik menekankan kewajiban pemerintah untuk mengelola anggaran secara akuntabel demi memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat (Aulia & Rahmawaty, 2020).

Kesenjangan informasi dalam hubungan ini menuntut adanya mekanisme pengawasan yang ketat guna memastikan bahwa pengelolaan tata kelola pemerintah daerah berjalan sesuai regulasi yang berlaku. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, proses pemeriksaan dan evaluasi yang independen, objektif, serta profesional sangat diperlukan untuk menilai kebenaran dan keandalan tanggung jawab keuangan negara. Oleh karena itu, masyarakat selaku prinsipal memiliki hak penuh untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja anggaran pemerintah daerah guna meminimalisasi konflik keagenan dan mendorong transparansi fiskal yang lebih baik.

Konsep Flypaper Effect

Metafora filosofis "*money sticks where it hits*" yang digagas oleh Arthur Okun (1960) menjadi cikal bakal lahirnya istilah gejala *flypaper effect*, yang kemudian diformalkan oleh Courant, Gramlich, dan Rubinfield (1979). Aprilia et al. (2023) menarik eksistensi dalam berbagai literatur, terminologi ini tetap dipertahankan dalam bahasa aslinya tanpa adanya penerjemahan. Secara teoretis, Aziz et al. (2025) menjelaskan anomali fiskal ini sebagai sebuah kondisi ketika kucuran TKD yang memicu stimulus pergeseran alokasi Belanja Daerah bergerak jauh lebih akseleratif ketimbang daya dorong yang mampu distimulasi oleh pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara mandiri.

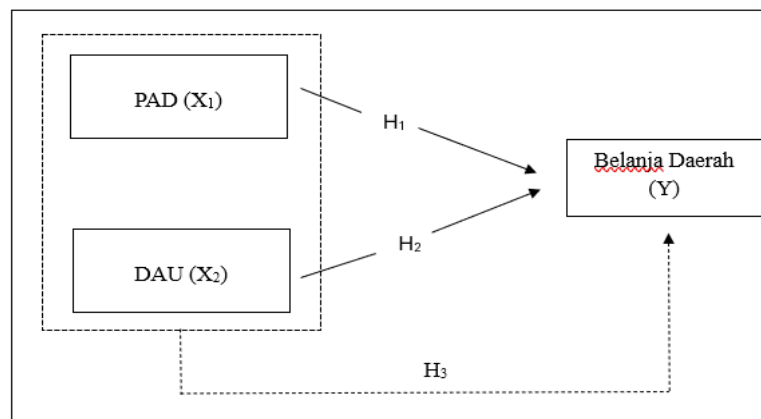
C. METODE PENELITIAN

Riset ini menerapkan pendekatan kuantitatif yang mengandalkan teknik regresi data panel dalam menguji sekaligus mengukur derajat keterikatan antar variabel yang diamati dalam rentang waktu 5 tahun. Penentuan sampel dilakukan melalui teknik sampling jenuh, di mana seluruh populasi yang terproses estimasi terhadap data sekunder yang terkumpul dilakukan melalui tiga pendekatan model regresi data panel. Langkah pengujian ekonometrika ini diterapkan secara menyeluruh pada 17



entitas kabupaten/kota di wilayah Sumatera Selatan yang bertindak sebagai unit analisis.

Melalui pendekatan kuantitatif, riset ini mengaplikasikan metode analisis regresi data panel dengan lokasi utama pada Provinsi Sumatera Selatan yaitu pada ke-17 kabupaten/kota. Struktur hubungan antarvariabel dalam penelitian ini dirancang untuk mengevaluasi dampak PAD sebagai variabel independen pertama (X_1) dan DAU sebagai variabel independen kedua (X_2) terhadap Belanja Daerah selaku variabel dependen (Y).



Gambar Kerangka Penelitian

Secara spesifik, terdapat tiga jalur kausalitas yang diuji: pertama, pengaruh parsial (individu) PAD terhadap Belanja Daerah yang dipostulasikan dalam hipotesis pertama (H_1); kedua, pengaruh parsial DAU terhadap Belanja Daerah dalam hipotesis kedua (H_2); serta ketiga, pengaruh simultan (serempak) antara PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah dalam hipotesis ketiga (H_3). Dalam menguji model regresi data panel ini, pembuktian pengaruh parsial akan dievaluasi lewat Uji t, sementara pengujian secara bersama-sama atau simultan akan didasarkan pada nilai Uji F.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Model

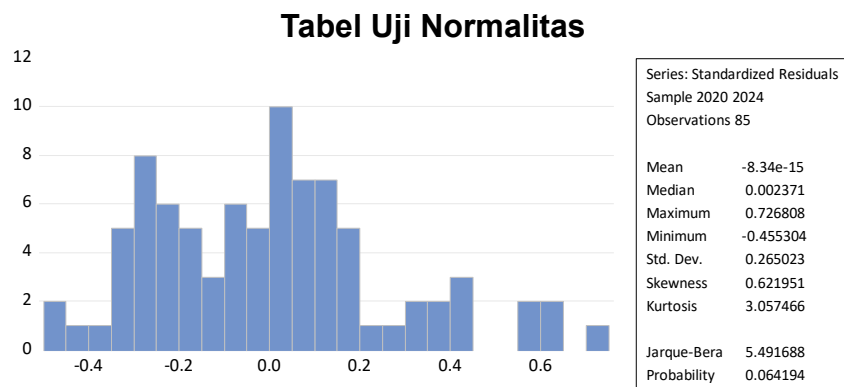
Penentuan model estimasi panel yang paling valid dalam riset ini didasarkan pada prosedur pengujian formal, diantaranya mencakup Uji Chow, Uji Hausman, serta Uji *Lagrange Multiplier*. Melalui ketiga tahapan evaluasi tersebut, *Random Effect Model* (REM) terbukti mendominasi dengan terpilih sebanyak dua kali sebagai pendekatan yang paling ideal. Oleh karena itu, seluruh tahapan estimasi parameter dan interpretasi hasil dalam studi ini secara konsisten merujuk pada pemodelan REM. Adapun rangkuman dari hasil estimasi regresi data panel berbasis REM tersebut disajikan secara ringkas dalam tabel.

Tabel Hasil Uji Model				
Pengujian	CEM	FEM	REM	Probability
Uji chow		V		0,0000
Uji hausmen			V	0.1050
Uji LM			V	0,0000

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Guna mendeteksi komponen galat atau pemenuhan kriteria distribusi normal pada nilai residual menjadi prasyarat mutlak, yang mana kelayakan asumsi klasik tersebut dibuktikan lewat evaluasi normalitas data. Dalam estimasi ekonometrika, suatu model regresi dikategorikan ideal apabila nilai residualnya memenuhi asumsi distribusi normal. Adapun output statistik dari pengujian normalitas yang diproses menggunakan bantuan program EViews 13 dipaparkan secara rinci pada tabel di bawah.



Sumber: data diolah menggunakan E-views 13 (2026)

Rangkuman hasil estimasi tersebut menginterpretasikan tingkat *p-value* sebesar 0,064194. Karena nilai *p* tersebut diatas ambang batas 0,05, maka kesimpulannya bahwa unsur *residual* dalam pemodelan riset ini terbukti telah lolos dan memenuhi kriteria asumsi distribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas dilakukan Ketika mendeteksi ada tidaknya korelasi atau houngan linier yang sangat kuat antar sesame variable penjelas (independen) didalam struktur model estimasi. Gejala multikolinearitas terindikasi muncul apabila terdapat dependensi fungsi linier yang sempurna atau mendekati sempurna, yang melibatkan sebagian maupun keseluruhan variabel bebas di dalam sistem regresi tersebut. (Mardiatmoko, 2020). Hasil uji multikolineritas dengan *Eviews 13* disajikan pada tabel berikut.

Tabel Uji Multikolinearitas		
	PAD	DAU
PAD	1.000000	0.713340
DAU	0.713340	1.000000

Sumber: data diolah menggunakan E-views 13 (2026)

Berdasar pada matriks korelasi tabel, terlihat jelas nilai koefisien korelasi antarasesama variabel penjelas atau X_1 dengan X_2 sebesar 0.713340, yang menunjukkan arah positif, dan nilai koefisien korelasi yang masih tergolong lemah karena semua nilai koefisien korelasi tersebut berada di bawah batas 0,90 atau nilai koefisien korelasi $< 0,90$, sehingga kedua variabel independen tersebut tidak saling mempengaruhi secara signifikan, dengan demikian, kriteria asumsi klasik terkait tidak adanya masalah multikolinearitas telah terpenuhi di dalam model regresi ini.



Uji Regresi Data Panel

Pendekatan statistik ini diaplikasikan dengan tujuan mendeteksi arah hubungan serta mengalkulikasi sejauh mana variabel-variabel bebas mengintervensi variabel terikat, melalui skenario kajian baik parsial maupun simultan. Adapun output estimasi dijalankan lewat skema *Random Effect Model* (REM) atau GLS yang telah ditetapkan sebagai model terbaik dirangkum dalam Tabel 4 di bawah ini.

Tabel Hasil Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.596261	3.571499	2.126911	0.0364
LOG(PAD)	0.279225	0.051630	5.408235	0.0000
LOG(DAU)	0.495768	0.153885	3.221678	0.0018

Sumber: data diolah menggunakan E-views 13 (2026)

Mengacu pada hasil estimasi parameter menggunakan *Random Effect Model* (REM) sebagaimana dirangkum dalam tabel, maka spesifikasi matematis untuk model regresi data panel dalam studi ini dikonstruksikan sebagai berikut.

$$BD = 7.596261 + 0.279225 \text{ PAD} + 0.495768 \text{ DAU} + e$$

Persamaan tersebut menunjukkan nilai konstanta sebesar 7.596261, yang mengindikasikan nilai minimum Belanja Daerah (BD) saat variabel independen dianggap konstan. Koefisien Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu 0.279225 menginterpretasikan bahwa setiap satu rupiah PAD yang naik, akan meningkatkan kemampuan Belanja Daerah sebanyak 0.279225. Sementara itu, koefisien Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai 0.495768 mengindikasikan bahwa setiap satu rupiah DAU yang meningkat, akan mendorong peningkatan kemampuan Belanja Daerah sebanyak 0.495768. Hubungan positif pada kedua variabel independen ini mengonfirmasi adanya arah kebijakan yang sejalan, di mana peningkatan PAD maupun DAU secara kontributif akan meningkatkan alokasi postur Belanja Daerah.

Pengujian Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Dalam pengujian t, dapat dilihat dari membandingkan nilai t_{hitung} yang diperoleh dari analisis regresi dengan nilai t_{tabel} . Hasil uji signifikansi parsial disajikan pada tabel:

Tabel Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.596261	3.571499	2.126911	0.0364
LOG(PAD)	0.279225	0.051630	5.408235	0.0000
LOG(DAU)	0.495768	0.153885	3.221678	0.0018

Sumber: data diolah menggunakan E-views 13 (2026)

Melalui konfirmasi parameter pada pengujian parsial (Uji t), ditemukan bukti kuat bahwa fluktuasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan dampak yang searah dan signifikan dalam mengintervensi postur Belanja Daerah. Posisi nilai t-hitung yang berada di atas ambang batas t-tabel menjadi dasar utama dalam penarikan kesimpulan atas penolakan hipotesis nol (H_0) ($5,408235 > 1,76131$) serta dukungan nilai probability yang dibuktikan oleh nilai *p-value* yang posisinya berada di bawah batas toleransi kesalahan statistik ($0,0000 < 0,05$), yang berarti hipotesis pertama (H_1) terkonfirmasi. Hal yang sama juga ditemukan pada variabel Dana Alokasi Umum (DAU), di mana secara individu, variabel ini menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Bukti faktual tersebut ditunjukkan berdasarkan nilai t-statistic yang berada di ambang batas t-tabel ($3,221678 > 1,76131$) disertai rerata signifikansi yang memenuhi kriteria ($0,0018 < 0,05$), yang pada akhirnya hipotesis kedua (H_2) dinyatakan diterima.

Hasil Uji Simultan (Uji f)

Uji Simultan (Uji F). Pengujian ini diterapkan dalam analisis statistik guna mengevaluasi pembuktian kontribusi kolektif dari seluruh variabel bebas di dalam model regresi memiliki tingkat signifikansi secara serempak terhadap variabel terikat. Kriteria pengujian ini bersandar pada rerata signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$). Adapun output dan visualisasi data dari hasil uji statistik F tersebut dipaparkan secara ringkas pada tabel dibawah ini.

Tabel Hasil Uji f

R-squared	0.513550	Mean dependent var	5.833464
Adjusted R-squared	0.501685	S.D. dependent var	0.163758
S.E. of regression	0.115599	Sum squared resid	1.095772
F-statistic	43.28402	Durbin-Watson stat	1.102649
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: data diolah menggunakan E-views 13 (2026)

Hasil uji F pada tabel menunjukkan nilai f statistic lebih besar dibanding f tabel $43.28402 > 3.74000$ dengan nilai signifikansi $0.000000 < 0.05$. Hasil ini artinya H_1 diterima, melalui pengujian serempak, ditemukan kenyataan bahwa fluktuasi PAD beserta DAU memegang peranan yang penting secara statistic dalam mengintervensi postur Belanja Daerah se-Sumatera Selatan selama 5 tahun.

Berdasarkan output statistik pada Tabel 6, hasil pengujian secara bersamaan (Uji F) menghasilkan nilai f-statistic yang terbukti melampaui ambang batas f-tabel ($43,28402 > 3,74000$). Didukung oleh tingkat signifikansi yang berada di bawah standar kesalahan ($0,000000 < 0,05$), maka hipotesis ketiga (H_3) dinyatakan diterima. Maka dari itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersama dengan Dana Alokasi Umum (DAU) secara serempak memberikan pengaruh terhadap postur Belanja di Daerah pada Pemerintah se-Sumatera Selatan yaitu 17 Kabupaten/Kota untuk kurun waktu 2020–2024.



Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah

Kajian secara parsial menunjukkan bahwa PAD mempengaruhi Belanja Daerah dengan arah yang positif dan signifikan pada Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan periode 2020–2024 $t\text{-statistic} > t\text{-tabel}$ yaitu $5.408235 > 1.76131$. Nilai parameter beta sebesar 0.279225 mengindikasikan adanya hubungan searah, yang mana setiap PAD mengalami kenaikan maka akan mendorong perluasan ruang fiskal (*fiscal space*) untuk alokasi belanja daerah. Secara teoretis, temuan ini selaras dengan logika keuangan publik dan *agency theory*. Kenaikan PAD mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah (agen) dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, yang sekaligus memperbesar kapasitas fiskal yang dikelola. Berdasarkan asumsi teori keagenan, ketersediaan dana internal yang lebih tinggi memberikan diskresi penuh dan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk merealisasikan berbagai program belanja publik guna memenuhi tuntutan masyarakat maupun kebutuhan birokrasi tanpa memicu ketergantungan pada pemerintah pusat. Sebagai modal fiskal internal, PAD menawarkan stabilitas pendanaan jangka panjang yang bersumber dari aktivitas ekonomi lokal. Senada dengan temuan Pormadinah et al. (2026) serta Lani et al. (2024) yang mengutarakan terkait penguatan PAD secara esensial berkorelasi positif dengan peningkatan mutu pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur daerah.

Postur Belanja Daerah terkonfirmasi mengalami ekspansi atau peningkatan yang nyata sebagai dampak searah dari kucuran Dana Alokasi Umum (DAU) saat diuji secara mandiri (parsial), yang divalidasi oleh perolehan nilai $t\text{-statistic}$ melampaui $t\text{-tabel}$ ($3,221678 > 1,76131$). Kendati demikian, pencermatan mendalam terhadap parameter estimasi memperlihatkan bahwa nilai koefisien DAU (0,495768) bernilai jauh lebih besar ketimbang koefisien PAD (0,279225). Kesenjangan respons fiskal ini memperkuat bukti empiris atas terjadinya gejala *flypaper effect* yang terjadi di dalam lingkup pemerintahan kota maupun kabupaten se-Provinsi Sumatera Selatan untuk kurun waktu 2020–2024. Temuan ini mengonfirmasi adanya anomali perilaku dalam tata kelola keuangan publik (Hines & Thaler, 1995), yaitu kecenderungan otoritas lokal untuk bertindak lebih responsif serta agresif dalam memacu belanja daerah saat mendapatkan kucuran dana transfer pusat (*block grant*) dibandingkan ketika mengoptimalkan potensi pendapatan mandiri mereka.

Dominasi DAU dipicu oleh karakteristiknya yang bernilai signifikan, berkepastian tinggi, dan minim resistensi politik dibandingkan dengan upaya peningkatan PAD yang sering kali menghadapi kendala sosial-politik (seperti menaikkan tarif pajak atau retribusi). Ketergantungan struktural yang tinggi ini, menurut Dewi dan Oktafia (2026), menghambat tercapainya target kemandirian fiskal dalam sistem desentralisasi. Temuan ini juga memperbarui studi Apriliawati et al. (2016) dan Pormadinah et al. (2026) yang menunjukkan bahwa pengetatan regulasi melalui Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah No. 1 Tahun 2022 ternyata belum mampu sepenuhnya mengikis ketergantungan Pemda di Sumatera Selatan terhadap dana perimbangan. Stimulus pusat masih menjadi mesin penggerak utama pengeluaran daerah, sedangkan optimalisasi PAD belum diandalkan secara maksimal dalam mengeksekusi kebijakan belanja diskresioner.

Apabila diuji secara serempak, variabel PAD beserta DAU memegang andil yang amat krusial serta berdampak nyata dalam menentukan besaran Belanja Daerah. Hasil membuktikan bahwa penganggaran Belanja Daerah didasarkan pada

total kapasitas fiskal yang tersedia. Saat merumuskan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), jajaran eksekutif di tingkat daerah wajib mengombinasikan kedua sumber penerimaan utama ini secara integratif, bukan parsial, untuk mendanai belanja operasi, belanja modal, maupun belanja tidak terduga. Meskipun sinergi penerimaan internal dan eksternal ini menjaga stabilitas pembangunan, dominasi DAU di dalamnya tetap perlu dikritisi. Keterikatan ini mempertegas hilangnya urgensi bagi pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan intensifikasi dan diversifikasi sektor-sektor produktif. Jika tata kelola keuangan jangka panjang ini terus didominasi dana transfer, efisiensi penganggaran akan melemah. Oleh karena itu, implikasi kebijakan dari temuan ini menuntut pemerintah daerah untuk menstrukturkan kembali alokasi DAU agar tidak sekadar memperbesar belanja konsumtif (seperti belanja pegawai), melainkan diarahkan sebagai stimulus sektor produktif yang mampu melahirkan objek pajak baru guna menekan ketergantungan fiskal dan menghindari dampak negatif *flypaper effect*.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Rangkaian hasil pengujian dalam studi ini menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara individu (parsial) memicu pertumbuhan yang nyata dan searah terhadap alokasi Belanja Daerah. Tren positif ini terpotret pada seluruh tata kelola keuangan kabupaten maupun kota se-Provinsi Sumatera Selatan sepanjang tahun 2020 hingga 2024. Penguatan sektor pendapatan internal ini terbukti memperlebar ruang diskresi bagi otoritas lokal guna mendanai berbagai agenda publik, belanja operasional, maupun pembangunan infrastruktur. Pada dimensi lain, kucuran Dana Alokasi Umum (DAU) secara individu turut menunjukkan pengaruh searah. Kendati demikian, tingginya derajat sensitivitas Belanja Daerah saat merespons dinamika DAU ketimbang PAD menjadi landasan empiris atas terjadinya gejala *flypaper effect* di lokus pengamatan. Secara serentak (simultan), Alokasi Belanja Daerah terbukti sangat dipengaruhi secara nyata oleh fluktuasi yang terjadi pada integrasi antara PAD serta DAU. Temuan inilah yang mengindikasikan formulasi penganggaran regional bertumpu pada akumulasi kapasitas fiskal secara menyeluruh, di mana pemerintah daerah mengombinasikan kedua instrumen pendanaan utama tersebut demi menopang keberlangsungan roda pemerintahan.

Saran

Guna menyikapi temuan mengenai gejala *flypaper effect*, sangat disarankan bagi wilayah Sumatera Selatan, khususnya pada jajaran pemda Tingkat II untuk menahan perilaku fiskal yang cenderung ekspansif saat menerima dana transfer, serta lebih agresif dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah. Langkah krusial ini diperlukan untuk meningkatkan proporsi PAD dalam APBD guna mengikis ketergantungan struktural terhadap pusat demi kemandirian fiskal yang berkelanjutan. Selain itu, pemerintah daerah harus meningkatkan efisiensi dengan mengalihkan pemanfaatan DAU agar tidak habis untuk kebutuhan rutin birokrasi (seperti belanja pegawai), melainkan diarahkan secara proporsional (*earmarking*) untuk pelayanan dasar publik dan infrastruktur produktif. Studi masa depan disarankan untuk memperluas generalisasi temuan dengan memperbanyak sampel wilayah analisis. Peneliti selanjutnya juga perlu menyertakan determinan belanja daerah lainnya sebagai variabel control



seperti komponen Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) serta mengakomodasi faktor makroekonomi makro seperti inflasi daerah untuk meminimalisasi risiko.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, M. D. R., Zulkifli, & Dwitayanti, Y. (2024). Fenomena Flypaper Effect pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 8(1), 202-210.
- Amril, A., Erfit, E., & Safri, M. (2015). Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 2(3), 135–146.
- Apriliawati, K. N., & Handayani, N. (2016). Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(7), 1–16.
- Aprilia, I., Maria, M., & Choiruddin, C. (2023). Belanja Pegawai, Investasi, dan Pembayaran Utang Pemerintah Daerah terhadap Fenomena Flypaper Effect. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 7(2), 278–285.
- Ariyanto, K., & Nasiansenus Masdjojo, G. (2025). Determinan Belanja Modal Untuk Membangun Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2018-2022). *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, 23(1), 45–54.
- Azis, F., Tikollah, M. R., Yunus, A., & Ramadhani, M. W. (2025). The Influence of the Flypaper Effect on Regional Financial Performance with SiLPA as Moderator in South Sulawesi Regencies. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 13(6), 1639–1650. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i6.4241>
- Elim, P., & Liando, P. (2016). Analisis Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Tomohon. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (EMBA)*, 4(1), 1018-1028.
- Ferdiansyah, I., Deviyanti, D. R., & Pattisahusiwa, S. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. *Inovasi*, 14(1), 44. <https://doi.org/10.29264/jinv.v0i0.3546>
- Fitrianti, dkk. (2025). Analisis Kemandirian Fiskal dan Fenomena Flypaper Effect pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 20(2), 112–126.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan masalah keagenan di pemerintah daerah: Sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1), 53–64.
- Inman, R. P. (2011). Flypaper Effect. *The New Palgrave Dictionary of Economics*, 13(2005), 1. <https://doi.org/10.1057/9780230226203.1901>

- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kristanti, A., Saputra, B., & Utami, C. (2025). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer terhadap Belanja Daerah: Studi Fenomena Flypaper Effect. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 16(1), 88–102
- Lani, O. Y., Perseveranda, M. E., Manafe, H. A., & Sonbay, Y. Y. Pengaruh Flypaper Effect terhadap Belanja Daerah dan Dampaknya pada Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT. *Journal of Education Research*. Vol. 5 No. 2. 2024.
- Mahmudi. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. UPP STIM YKPN. Yogyakarta. 2019.
- Mangowal, J. C., Pendapatan Daerah Pengaruhnya Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Ekonomi & Akuntansi*. 1(4), 1386–1396.
- Mello, L. de, & Barenstein, M. (2001). Fiscal Desentralization and Governace: A Cross-Country Analisis. In IMF Working Paper (pp. 333–365). <https://ulilalbabinstitute.co.id/index.php/EKOMA/article/view/3877>
- Mutiara, A., & Astuti, Y. P. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal. *JABKO: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Kontemporer*, 1(1), 12–24.
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal Federalism*, Harcourt Brace Jovanovich. New York, 35.
- Pormadinah, R., Usman, H., & Sultan. Analisis Flypaper Effect: Dampak PAD dan DAU terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *RATIO: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*. Vol. 7 No. 1. 2026
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757. Sekretariat Negara. Jakarta. 2022.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587. Sekretariat Negara. Jakarta. 2014.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sholihat, I., & Lubis, T. A. (2024). Analisis Flypaper Effect, Fiscal Stress dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan Tax Effort sebagai Variabel Moderasi pada Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu)*, 13(05), 1545-1560.



- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Bandung: Alfabeta.
- Suyanto. (2010). Flypaper Effect Theory Dalam Implementasi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(1995), 69–92.
- Wijayanti, R. (2023). Flypapper effect pada belanja daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan (JIAK)*, 6(1), 108–117.
- Zulafah, A. F., Arifin, A., & Binardjo, G. (2023). Analisis pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH, dan PDRB terhadap belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. *Lingkar Ekonomika*, 2(2), 8–20. <http://jos.unsoed.ac.id/index.php/jle/index>